

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur untuk periode Tahun 2022 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Luwu Timur dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2022. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Dalam perjalanan pelaksanaan kegiatan, terdapat beberapa dinamika yang menuntut penyesuaian kegiatan sehingga harus dilakukan perubahan. Adapun alasan/pertimbangan yang mendasar

dilakukan perubahan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2022 adalah:

- a. Adanya perubahan kelembagaan Kesbangpol Luwu Timur;
- b. Adanya pergeseran pagu kegiatan;
- c. Adanya kebutuhan mendesak yang perlu segera ditindaklanjuti.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan perubahan dokumen Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 sebagai pedoman penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Renja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Luwu Timur adalah :

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Dalam Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada pasal 18 ayat (1) yang menerangkan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) disampaikan oleh Kepala Daerah dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 03 Tahun 2018 tentang Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 03);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 13);
7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 80);
8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu timur.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 adalah sebagai penyempurnaan Renja Tahun 2022. Renja Perubahan disusun untuk menyesuaikan perubahan program dan kegiatan yang tertuang pada Perubahan RKPD 2022, dalam upaya percepatan pencapaian indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah ditetapkan karena perubahan kondisi dan permasalahan yang dihadapi. Adapun tujuan dari disusunnya Renja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022, antara lain:

1. Mewujudkan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode 2021 – 2026 Kab. Luwu Timur;
2. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2022 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
3. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang akan dilaksanakan pada tahun 2022;
4. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022; dan
5. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

Bab ini menguraikan tentang kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah dalam tahun berjalan

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah pada tahun rencana

BAB IV : PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah % Capaian Renstras Perangkat Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pelaksanaan tugasnya melaksanakan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Dalam pelaksanaan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan 6 (enam) Program, 13 (tiga) kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 4.120.208.839,- dengan realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp.1.370.767.486,- atau 33,27% dari yang seharusnya 74.09% sesuai dengan anggaran kas pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2022.

Masih rendahnya realisasi anggaran sampai Triwulan II disebabkan karena terdapatnya beberapa kegiatan yang belum terealisasi anggarannya, antara lain pencairan dana bantuan keuangan Partai Politik yang disebabkan oleh karena belum masuknya permohonan pencairan bantuan keuangan Partai Politik, dan anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN alokasi anggaran kegiatan tersebut cukup besar karena dipersiapkan untuk 19 orang ASN, namun ditahun 2022 hanya diisi 12 orang ASN. Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan Triwulan II, kondisi bulan Juni 2021 masih rendah tetapi secara fisik telah dalam proses pelaksanan, pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Kerja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD/Renja PD sd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renja PD yang dievaluasi tahun 2022	
										I		II		III		IV					
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%	
				K	Rp0,00	K	Rp0,00	K	Rp0,00	K	Rp0,00	K	Rp0,00	K	Rp0,00	K	Rp0,00	K	Rp0,00	K	Rp0,00
		PEMERINTAHAN UMUM																			
		BADAN KESBANGPOL																			
1	0	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota	Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi	100	3.122.963.330	100	1.641.172.923		2.560.903.469		258.337.542		91.869.650		0		0		951.215.886		
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dok perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	100	32.500.000	100	38.057.950		24.380.675		4.379.560		6.926.845					11.306.405			
		Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dok perencanaan yang disusun tepat waktu	2	21.000.000	3	23.636.390	2	17.493.200	1	3.194.080	0	4.350.980					1	7.545.060	50,00%	43,13%
		Koordinasi dan penyusunan Dok RKA-SKPD	Jumlah Dok RKA SKPD yang disusun	2	5.500.000	2	3.608.155	2	3.443.725	0	665.870	1	1.406.855					1	2.072.725	50,00%	60,19%
		Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dok evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun	10	6.000.000	10	10.813.405	10	3.443.750	4	519.610	2	1.169.010					6	1.688.620	60,00%	49,03%
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			51,41%	46,37%	
Predikat Kinerja																			Rendah	Sangat Rendah	
		Kegiatan Administrasi Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan dimanfaatkan	100	2.360.943.330	47,71	1.023.067.311		2.034.107.291		160.358.819		532.343.579					692.702.398			
		Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan	19	2.297.943.330	9	967.373.235	19	1.975.714.796	12	156.358.819	13	511.403.864					13	667.762.683	68,42%	33,80%
		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	18	63.000.000	18	55.694.076	18	58.392.495	4	4.000.000	4	20.939.715					8	24.939.715	44,44%	42,71%
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			67,73%	34,05%	
Predikat Kinerja																			Sedang	Sangat Rendah	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD/Renja PD sd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renja PD yang dievaluasi tahun 2022	
										I		II		III		IV					
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%	
				K	Rp0,00	K	Rp0,00	K	Rp0,00	K	Rp0,00	K	Rp0,00	K	Rp0,00	K	Rp0,00	K	Rp0,00	K	Rp0,00
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan BMD pada perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan dimanfaatkan	100	2.300.000	4	3.459.730		1.804.425		-		1.040.585						1.040.585		
		Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	4	2.300.000	4	3.459.730	4	1.804.425	1	-	1	1.040.585					2	1.040.585	50,00%	57,67%
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				50,00%	57,67%
Predikat Kinerja																				Sangat Rendah	Rendah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase data dan informasi pegawain perangkat daerah yang diadministrasikan	100	130.000.000	100	58.420.909		47.648.378		11.690.745		16.160.866						27.851.611		
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan	12	40.000.000	12	33.988.909	12	31.848.378	3	4.695.745	3	9.155.866					6	13.851.611	50,00%	43,49%
		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yaang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	19	90.000.000	4	24.432.000	2	15.800.000	1	6.995.000	1	7.005.000					2	14.000.000	100,00%	88,61%
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				66,58%	58,45%
Predikat Kinerja																				Sedang	Rendah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan umum perangkat daerah yang terpenuhi	100	336.770.000	100	329.974.505		299.582.700		54.794.250		91.869.650						146.663.900		
		Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	11	3.300.000	7	2.488.720	8	2.194.150	8	595.550	8	595.550					8	1.191.100	100,00%	54,29%
		Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik yang disediakan	30	9.000.000	21	8.150.000	19	3.975.350	5	526.700	19	1.567.400,00					19	2.094.100	100,00%	52,68%
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan	3	15.000.000	3	23.525.900	3	10.725.000	3	2.555.000	3	2.690.000					3	5.245.000	100,00%	48,90%
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	108	10.920.000	58	5.910.000	60	6.120.000	6	720.000	21	1.980.000					27	2.700.000	45,00%	44,12%
		Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	190	8.550.000	201	9.900.000	150	6.750.000	30	1.644.000	30	637.000					60	2.281.000	40,00%	33,79%
		Penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti	310	290.000.000	542	279.999.885	304	269.818.200	117	48.753.000	75	84.399.700					192	133.152.700	63,16%	49,35%

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD/Renja PD sd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renja PD yang dievaluasi tahun 2022		
										I		II		III		IV						
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		
				K	Rp0,00	K	Rp0,00	K	Rp0,00	K	Rp0,00	K	Rp0,00	K	Rp0,00	K	Rp0,00	K	Rp0,00	K	Rp0,00	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					64,34%	48,96%
Predikat Kinerja																					Rendah	Sangat Rendah
		Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang diadakan	100	80.000.000	100	55.938.700		15.000.000		-								15.000.000			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan / mesin lainnya yang diadakan	7	80.000.000	9	55.938.700	1	15.000.000	0	0	1	15.000.000					1	15.000.000	100,00%	100,00%	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					100,00%	100,00%
Predikat Kinerja																					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
		Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100	104.600.000	100	89.338.637		96.900.000		14.384.168		22.121.099		0		0		36.505.267			
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	350	3.300.000	350	1.660.000	350	2.400.000	118	600.000	91	-					209	600.000	59,71%	25,00%	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening telepon, listrik, dan air yang terbayarkan	24	39.500.000	24	29.478.637	24	37.500.000	6	4.284.168	6	7.871.099					12	12.155.267	50,00%	32,41%	
		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan	4	61.800.000	3	58.200.000	3	57.000.000	3	9.500.000	3	14.250.000					3	23.750.000	100,00%	41,67%	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					79,65%	37,67%
Predikat Kinerja																					Tinggi	Sangat Rendah
		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	100	75.850.000	100	42.915.181		41.480.000		12.730.000		7.415.720		0		0		20.145.720			
		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	5	36.000.000	4	20.310.181	4	21.000.000	1	4.100.000	4	5.905.720					4	10.005.720	100,00%	47,65%	
		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	50	19.850.000	36	15.605.000	29	13.480.000	5	1.630.000	7	1.510.000					12	3.140.000	41,38%	23,29%	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD/Renja PD sd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renja PD yang dievaluasi tahun 2022	
										I		II		III		IV					
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%	
				K	Rp0,00	K	Rp0,00	K	Rp0,00	K	Rp0,00	K	Rp0,00	K	Rp0,00	K	Rp0,00	K	Rp0,00	K	Rp0,00
		Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya dipelihara / direhabilitasi	1	20.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	0	0					1	7.000.000	100,00%	100,00%
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				80,95%	48,57%
Predikat Kinerja																				Tinggi	Sangat Rendah
		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase pelaksanaan kebijakan penguatan ideologi Pancasila dan karakter	95	239.573.635	100	98.167.496		84.835.590		4.391.000								24.717.285		
		Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase capaian pelaksanaan koodinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	95	239.573.635	100	98.167.496		84.835.590		4.391.000		20.326.285						24.717.285		
		Pelaksanaan koordinasi dibidang wawasan kebangsaan , bela negara, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa dan pembauran kebangsaan yang disusun	2	239.573.635	2	98.167.496	3	84.835.590	0	4.391.000	1	20.326.285					1	24.717.285	33,33%	29,14%
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				33,33%	29,14%
Predikat Kinerja																				Sangat Rendah	Sangat Rendah
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budava Politik	Persentase capaian peningkatan partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budava politik	95	980.000.000	100	818.448.909		724.517.315		360.000								20.300.820		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD/Renja PD sd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renja PD yang dievaluasi tahun 2022	
										I		II		III		IV					
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%	
				K	Rp0,00	K	Rp0,00	K	Rp0,00	K	Rp0,00	K	Rp0,00	K	Rp0,00	K	Rp0,00	K	Rp0,00	K	Rp0,00
		Perumusan Kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik	Persentase capaian peningkatan partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	95	980.000.000	100	818.448.909		724.517.315		360.000		19.940.820						20.300.820		
		Penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik	Jumlah pengurus parpol dan masyarakat yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM	110	200.000.000	10	18.405.063	20	30.966.350	0	-	19	18.761.350					19	18.761.350	95,00%	60,59%
		Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik	Jumlah laporan partai politik yang diverifikasi	10	730.000.000	10	790.144.931	10	684.198.925	0	-	0	0					0	-	0,00%	0,00%
		Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik	Jumlah laporan pemantauan situasi politik daerah	4	50.000.000	4	9.898.915	4	9.352.040	1	360.000	1	1.179.470					2	1.539.470	50,00%	16,46%
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				4,71%	2,80%
Predikat Kinerja																				Sangat Rendah	Sangat Rendah

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD/Renja PD sd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renja PD yang dievaluasi tahun 2022	
										I		II		III		IV					
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%	
				K	Rp0,00	K	Rp0,00	K	Rp0,00	K	Rp0,00	K	Rp0,00	K	Rp0,00	K	Rp0,00	K	Rp0,00	K	Rp0,00
		Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Persentase jumlah ormas yang diberdayakan dan diawasi	95	95.000.000	100	34.441.615		24.351.370		3.110.000								13.293.885		
		Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Jumlah SKT yang terbit	110	95.000.000	100	34.441.615		24.351.370		3.110.000		10.183.885						13.293.885		
		Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	Jumlah SKT yang terbit	110	95.000.000	100	34.441.615	102	24.351.370	32	3.110.000	38	10.183.885				70	13.293.885	68,63%	54,59%	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				68,63%	54,59%
Predikat Kinerja																				Sedang	Rendah
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase jumlah pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	95	190.000.000	100	211.905.713		360.501.865		17.836.900							188.143.650			
		Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Persentase capaian pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya serta kerukunan umat beragama	95	190.000.000	100	211.905.713		360.501.865		17.836.900		170.306.750					188.143.650			
		Pelaksanaan koordinasi dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengembanganketahanan ekonomi, sosial dan budaya serta kerukunan umat beragama	4	190.000.000	3	211.905.713	4	360.501.865	1	17.836.900	1	170.306.750				2	188.143.650	50,00%	52,19%	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				50,00%	52,19%
Predikat Kinerja																				Sangat Rendah	Rendah

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD/Renja PD sd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renja PD yang dievaluasi tahun 2022	
										I		II		III		IV					
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%	
				K	Rp0,00	K	Rp0,00	K	Rp0,00	K	Rp0,00	K	Rp0,00	K	Rp0,00	K	Rp0,00	K	Rp0,00	K	Rp0,00
		Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Persentase capaian peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial	95	102.000.000	100	440.078.653		365.099.230		5.180.000								173.095.960		
		Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	Persentase capaian pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	95	102.000.000	100	440.078.653		365.099.230		5.180.000		167.915.960						173.095.960		
		Pelaksanaan koordinasi dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	Jumlah laporan konflik sosial dan kewaspadaan dini di daerah	4	52.000.000	4	408.915.945	4	351.202.925	1	3.180.000	1	163.759.655					2	166.939.655	50,00%	47,53%
		Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	Jumlah laporan pengawasan dan pemantauan orang asing	4	50.000.000	4	31.162.708	4	13.896.305	1	2.000.000	1	4.156.305					2	6.156.305	50,00%	44,30%
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				50,00%	47,41%
Predikat Kinerja																				Sangat Rendah	Sangat Rendah
4.120.208.839										TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)										52,99%	33,27%
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)																				Rendah	Sangat Rendah

Dari Tabel diatas dapat disampaikan bahwa Realisasi pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan, anggaran dan realisasi, dari penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan rincian sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.24.380.675,- dan realisasi keuangan sampai dengan Triwulan II Rp.11.306.405,- atau 46,37% dengan realisasi kinerja kegiatan mencapai 51,41%.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.034.107.291,- dan realisasi keuangan Rp.692.702.398,- atau 34,05% dengan realisasi kinerja kegiatan mencapai 67,93%.
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.804.425,- dan realisasi keuangan Rp.1.040.585,- atau 57,67% dengan realisasi kinerja kegiatan mencapai 50,00%.
4. Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.47.648.378,- dan realisasi keuangan Rp.27.851.611,- atau 58,45% dengan realisasi kinerja kegiatan mencapai 66,58%.
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.299.582.700,- dan realisasi keuangan Rp.146.663.900,- atau 48,96% dengan realisasi kinerja kegiatan mencapai 64,34%.
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.15.000.000,- dan realisasi keuangan Rp.15.000.000,- atau 100% dengan realisasi fisik kegiatan mencapai 100%
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.96.900.000,- dan realisasi keuangan Rp.36.505.267,- atau 37,67% dengan realisasi kinerja kegiatan mencapai 79,65%.

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.41.480.000,- dan realisasi keuangan Rp.20.145.720,- atau 48,57% dengan realisasi kinerja kegiatan mencapai 80,95%.
- II. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan alokasi anggaran Rp. 84.835.590,- sampai triwulan II realisasi keuangan 24.717.285,- atau 29,14%, dengan realisasi kinerja kegiatan mencapai 33,33%.
- III. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik dengan alokasi anggaran sebesar Rp.724.517.315,- sampai Triwulan II realisasi keuangan Rp.20.300.820,- atau 2,80% dengan realisasi kinerja kegiatan mencapai 4,71%.
- IV. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.24.351.370,- sampai Triwulan II realisasi keuangan Rp.13.293.885,- atau 54,59% dengan realisasi kinerja kegiatan mencapai 68,63%.

- V. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
 - 1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya alokasi anggaran sebesar Rp.360.501.865,- sampai triwulan II realisasi keuangan Rp.188.143.650,- atau 52,19% dengan realisasi kinerja kegiatan mencapai 50,00%.
- VI. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial
 - 1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp.365.099.230,- sampai triwulan II realisasi keuangan Rp.173.095.960,- atau 47,41% dengan realisasi kinerja kegiatan mencapai 50,00%.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur merupakan bagian dari perangkat daerah sebagai unsur pelayanan dan fasilitasi terhadap kehidupan politik dan meningkatkan keamanan, ketertiban dan kenyamanan yang kondusif dalam lingkungan masyarakat di Kabupaten Luwu Timur, yang dipimpin oleh kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah berisi tentang kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Analisis kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Luwu Timur dalam menilai keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian kinerja menggunakan indikator kinerja kunci sesuai dengan sasaran target yang ada dalam renstra tahun 2021 – 2026. Untuk lebih jelasnya lihat table berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Renstra 2021 – 2026
Kabupaten Luwu Timur

N o	Indikator	Kondisi kinerja pada awal period RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Realisasi Capaian	Proyeksi	Catatan Anlisis
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase konflik keagamaan yang terdata dan terfasilitasi	0	80,50	84,50	88,50	92,50	0	94,50	
2	Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu Nasional dan Lokal	79,18	79,18	79,18	80,05	80,05	79,18	81,00	
3	Nilai SAKIP	66	67	69	71	72	0	72	

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
TPB dan SDGs
Kabupaten Luwu Timur

NO	Nomor Indikator TPB/ SDGs	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	SAT UAN	THN 2016	THN 2017	THN 2018	THN 2019	THN 2020	THN 2021	THN 2022	RUMUS Metadata SDGs/TPB	Keterangan	OPD Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ASPEK PELAYANAN UMUM											
		kesbangpol											
1	16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	Kasus	1	2	2	2	0	0	0	Tidak ada Rumus		KesbangPol
2	16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk	%	0,1	0,2	0,2	0,2	0	0	0	$KDK = \frac{JK}{JP} \times 100\%$ Keterangan : KDK : Kematian disebabkan konflik JK : Jumlah korban meninggal disebabkan	JK : Tahun 2016 (1 kasus), Tahun 2017 (2 kasus), Tahun 2018 (2 kasus), Tahun 2019 (2 kasus) dan Tahun 2020 (0 kasus). Dan Jumlah Penduduk (JP) : 100.000 jiwa	KesbangPol

3	16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	%	0	0	0	0	0	0	0	$P\text{ PKK} = \frac{JP\text{KK}}{JP} \times 100\%$ Keterangan : P PKK : Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir JPKK : Jumlah penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	JPKK : 6 Kasus, JP : 301,273	KesbangPol
4	16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	%	0	0	0	0	0	0	0	$PPMA = \frac{JPMA}{JP} \times 100\%$ Keterangan : PPMA : Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya JPMA : Jumlah penduduk yang merasa aman	Indikator ke Satpol PP	-

Berdasarkan tabel 2.3 tersebut dapat dijelaskan bahwa :

- **Persentase Konflik Keagamaan yang Terdata dan Terfasilitasi**
Untuk indikator yang pertama ini yakni melakukan pendataan terhadap konflik keagamaan yang terjadi di wilayah kabupaten Luwu Timur serta memberikan fasilitasi dalam mendukung penyelesaian konflik keagamaan. Dalam mencapai indikator ini ada 3 program yang mendukung yakni Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya serta Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, dimana target untuk tahun 2022 yakni 80,50% dan capaiannya dapat dilihat pada akhir tahun 2022.
- **Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu Nasional dan Lokal**
Untuk Indikator yang kedua ini yakni melakukan sosialisasi yang masif kepada masyarakat akan pentingnya partisipasi politik dalam rangka meningkatkan budaya politik suatu daerah. Dalam mencapai indikator ini ada 2 program yang mendukung yakni Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik dan Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dimana target untuk tahun 2022 yakni 79,18% dan capaiannya dapat dilihat pada akhir tahun 2022.
- **Nilai SAKIP**
Untuk indikator Nilai SAKIP, merupakan pencapaian dari pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan selama 1 (satu) tahun yang penilaiannya diberikan pada saat setelah evaluasi dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten di akhir tahun 2022.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu penting yang akan dihadapi berdasar pada tugas dan fungsi perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Permasalahan pada bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama :
 1. Kurangnya pemahaman, kesadaran dan pengamalan terhadap 4 pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika di masyarakat;
 2. Belum terbentuknya lembaga teknis Pusat Pendidikan Kebangsaan;
 3. Adanya kesenjangan antar etnik/etnis/suku yang ada di wilayah Kabupaten Luwu Timur;
 4. Masih kurangnya pelaksanaan penyuluhan tentang pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba psikotropika dan zat adiktif lainnya kepada Tokoh Masyarakat maupun generasi muda dan pelajar di kabupaten Luwu Timur.
- b. Permasalahan pada bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial :
 1. Karakteristik daerah yang dibangun dalam kondisi yang masih terbatas yang berpotensi menimbulkan kerawanan sosial, politik dan kewilayahan serta rawan akan konflik;
 2. Adanya pergesekan antar masyarakat maupun kelompok masyarakat yang dilatar belakangi oleh perbedaan suku, ras dan agama;
 3. Masih lemahnya koordinasi antar lembaga sektoral di bidang kewaspadaan dini;
 4. Adanya kelompok-kelompok atau organisasi yang membawa paham-paham radikal yang menimbulkan konflik dimasyarakat;
 5. Masih adanya warga negara asing yang keluar – masuk di wilayah Kabupaten Luwu Timur tanpa memiliki data yang lengkap
- c. Permasalahan pada bidang politik dalam negeri :

1. Masih terbatasnya Pendidikan Politik pada masyarakat dan generasi muda;
2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat mendaftarkan ormas dan LSM;
3. Belum terhimpunnya seluruh data ormas, parpol dan LSM di Kabupaten Luwu Timur;
4. Kurangnya kesadaran pengurus parpol penerima bantuan keuangan dalam penyelesaian administrasi bantuan keuangan parpol;
5. Belum maksimal pelaksanaan monev terhadap keberadaan ormas, parpol dan LSM di Kab. Luwu Timur

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan POLitik dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2022 Hasil Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan yang disajikan dalam Lampiran *Tabel 2.4* berikut ini :

TABEL 2.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD 2022

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Belanja Operasi				4.120.208.839	Belanja Operasi				4.120.208.839
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota		Persentase rata- rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi	100%	2.361.954.914	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota		Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi	100%	2.436.448.914
	Keg : Perencanaan, Panganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, panganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	100%	31.312.125	Keg : Perencanaan, Panganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, panganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	100%	30.542.125
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	2 Dok	19.666.600	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	2 Dok	19.666.600
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dok	4.873.650	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dok	4.873.650
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun	10 Dok	6.771.875	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun	10 Dok	6.001.875
	Keg : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	100%	1.576.056.567	Keg : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	100%	1.565.492.467

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan	12 Orang	1.516.164.072	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan	12 Orang	1.505.599.972
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD yang disusun tepat waktu	18 Dok	59.892.495	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD yang disusun tepat waktu	18 Dok	59.892.495
	Keg. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar	100%	1.804.425	Keg. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar	100%	1.804.425
	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD		Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun	4 Dok	1.804.425	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD		Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun	4 Dok	1.804.425
	Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase data dan informasi pegawai perangkat daerah yang diadministrasikan	100%	70.234.353	Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase data dan informasi pegawai perangkat daerah yang diadministrasikan	100%	62.149.953
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan	12 Dok	28.509.953	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan	12 Dok	28.509.953
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah ASN dan Upah Jasa yang mengikuti bimtek dan implementasi peraturan perundang-undangan	5 Orang	41.724.400	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah ASN dan Upah Jasa yang mengikuti bimtek dan implementasi peraturan perundang-undangan	4 Orang	33.640.000
	Keg : Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase kebutuhan umum perangkat daerah yang terpenuhi	100%	366.040.075	Keg : Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase kebutuhan umum perangkat daerah yang terpenuhi	100%	401.612.575
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor		Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	10 Jenis	8.905.925	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor		Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	10 Jenis	8.905.925

	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6 Buah	1.290.000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6 Buah	2.940.000
	Penyediaan bahan logistik kantor		Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	20 Jenis	7.281.150	Penyediaan bahan logistik kantor		Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	20 Jenis	8.181.150
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Jumlah barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan	3 Jenis	14.840.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Jumlah barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan	3 Jenis	14.840.000
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60 Exempler	6.720.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60 Exempler	6.720.000
	Fasilitasi kunjungan tamu		Jumlah tamu yang difasilitasi	200 Orang	9.000.000	Fasilitasi kunjungan tamu		Jumlah tamu yang difasilitasi	200 Orang	9.000.000
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti	306 Kali	318.003.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti	470 Kali	351.025.500
	Keg : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang diadakan	100%	145.377.369	Keg : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang diadakan	100%	201.527.369
	Pengadaan mebel		Jumlah mebel yang diadakan	22 Jenis	27.471.369	Pengadaan mebel		Jumlah mebel yang diadakan	23 Jenis	38.471.369
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya		Jumlah peralatan/mesin lainnya yang diadakan	9 Unit	53.746.000	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya		Jumlah peralatan/mesin lainnya yang diadakan	14 Unit	138.336.000
	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	2 Unit	26.360.000	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	2 Unit	24.720.000
	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	1 Unit	37.800.000	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	-	-

Keg : Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	93.700.000	Keg : Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	93.700.000
Penyediaan jasa surat menyurat		Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	350 Surat	1.000.000	Penyediaan jasa surat menyurat		Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	350 Surat	1.000.000
Penyediaan jasa komunikasi Sumber daya air dan listrik		Jumlah rekening telepon, air dan listrik yang terbayarkan	24 Rekening	34.500.000	Penyediaan jasa komunikasi Sumber daya air dan listrik		Jumlah rekening telepon, air dan listrik yang terbayarkan	24 Rekening	34.500.000
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan	4 Orang	58.200.000	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan	4 Orang	58.200.000
Keg : Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100%	77.430.000	Keg : Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100%	79.620.000
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	4 Unit	32.000.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	4 Unit	32.000.000
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	30 Unit	16.430.000	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	30 Unit	16.980.000
Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	1 Unit	17.000.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	1 Unit	18.640.000

	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	12.000.000	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	12.000.000
	Program : Penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Persentase pelaksanaan kebijakan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan yang dilaksanakan	95%	146.364.590	Program : Penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Persentase pelaksanaan kebijakan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan yang dilaksanakan	95%	151.804.590
	Keg : Perumusan Kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Persentase capaian pelaksanaan koordinasi dibidang ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	95%	146.364.590	Keg : Perumusan Kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Persentase capaian pelaksanaan koordinasi dibidang ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	95%	151.804.590
	Pelaksanaan koordinasi dibidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan		Jumlah Laporan pelaksanaan koordinasi dibidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, yang disusun	3 Laporan	146.364.590	Pelaksanaan koordinasi dibidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan		Jumlah Laporan pelaksanaan koordinasi dibidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, yang disusun	3 Laporan	151.804.590

Program : Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik		Persentase capaian Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	95%	747.917.315	Program : Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik		Persentase capaian Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	95%	752.192.315
Keg : Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika, budaya politik, peningkatan demokrasi. Fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik		Persentase capaian pendidikan politik, etika budaya politik dan peningkatan demokrasi dan fasilitasi kelembagaan pemerintahan serta pemantauan politik	95%	747.917.315	Keg : Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika, budaya politik, peningkatan demokrasi. Fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik		Persentase capaian pendidikan politik, etika budaya politik dan peningkatan demokrasi dan fasilitasi kelembagaan pemerintahan serta pemantauan politik	95%	752.192.315
Penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan		Jumlah pengurus parpol dan masyarakat yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM	20 Orang	27.236.350	Penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan		Jumlah pengurus parpol dan masyarakat yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM	20 Orang	27.236.350

	umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah					umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah				
	Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah		Jumlah laporan partai politik yang diverifikasi	10 Laporan	694.608.925	Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah		Jumlah laporan partai politik yang diverifikasi	10 Laporan	698.883.925

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah		Jumlah laporan pemantauan situasi politik daerah	4 Laporan	26.072.040	Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah		Jumlah laporan pemantauan situasi politik daerah	4 Laporan	26.072.040
Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Persentase jumlah ormas yang diberdayakan dan diawasi	100%	40.761.370	Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Persentase jumlah ormas yang diberdayakan dan diawasi	100%	40.761.370
Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan		Jumlah Ormas yang diberdayakan dan diawasi	102 Unit	40.761.370	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan		Jumlah Ormas yang diberdayakan dan diawasi	110 Unit	40.761.370
Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas		Jumlah SKT yang terbit	102 SKT	40.761.370	Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas,		Jumlah SKT yang terbit	110 Unit	40.761.370

	dan ormas asing di daerah					pengawasan ormas dan ormas asing di daerah				
	Program : Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Persentase jumlah pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	95%	369.782.365	Program : Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Persentase jumlah pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	95%	308.608.365
	Keg : Perumusan Kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan, ekonomi, sosial dan budaya		Persentase capaian pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, budaya serta kerukunan umat beragama	95%	369.782.365	Keg : Perumusan Kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan, ekonomi, sosial dan budaya		Persentase capaian pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, budaya serta kerukunan umat beragama	95%	308.608.365
	Pelaksanaan koordinasi dibidang ketahanan ekonomi, sosial. Budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan		Jumlah Laporan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, budaya serta kerukunan umat beragama	4 Laporan	369.782.365	Pelaksanaan koordinasi dibidang ketahanan ekonomi, sosial. Budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan		Jumlah Laporan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, budaya serta kerukunan umat beragama	4 Laporan	308.608.365
	Program :Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas		Persentase capaian peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas	95%	453.428.285	Program :Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas		Persentase capaian peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial	95%	430.393.285

	penanganan konflik sosial		penanganan konflik sosial			penanganan konflik sosial				
	Keg : Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial		Persentase capaian pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial dan pemantauan orang asing	95%	453.428.285	Keg : Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial		Persentase capaian pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial dan pemantauan orang asing	95%	430.393.285
	Pelaksanaan koordinasi dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik daerah		Jumlah laporan konflik sosial dan kewaspadaan dini di daerah	4 Laporan	427.331.980	Pelaksanaan koordinasi dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik daerah		Jumlah laporan konflik sosial dan kewaspadaan dini di daerah	4 Laporan	404.236.980

	Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah		Jumlah laporan pengawasan dan pemantauan orang asing	4 Laporan	26.096.305	Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah		Jumlah laporan pengawasan dan pemantauan orang asing	4 Laporan	26.156.305
--	---	--	--	-----------	------------	---	--	--	-----------	------------

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, politik, atas-bawah (top down) dan bawah-atas (bottom up). Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten merupakan penjabaran pelaksanaan pembangunan provinsi dan pusat, Pembangunan nasional yang ditetapkan untuk tahun 2022 tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2022 dengan tema “Pemantapan Kemajuan dan Kemandirian Daerah dengan didukung oleh Situasi Kondusif bagi Ketertiban Umum dan Penyelenggaraan Demokrasi”.

3.2. Tujuan dan Sasaran

Berpedoman pada arah pembangunan berdasarkan RPJPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 – 2025 dan RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026 dan isu strategis Tahun 2023.

Untuk mewujudkan daerah Kabupaten Luwu Timur yang berdaya saing, mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dimasa sekarang dan yang akan datang membutuhkan perencanaan kebijakan yang lebih akurat dan akuntabel. Sehubungan dengan hal tersebut maka disusun Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa & Politik Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut:

a. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan target pembangunan daerah maka tujuan yang ingin dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran FKUB dalam membangun kerukunan agama serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

b. Sasaran

Dalam upaya menuju tercapainya tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur, maka sasaran Badan Kesatuan Bangsa & Politik adalah sebagai berikut :

1. Terciptanya kerukunan umat beragama yang harmonis.
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum.
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan OPD

Tujuan dan sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun 2022

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatkan peran FKUB dalam membangun kerukunan umat beragama serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya	Persentase peningkatan peran FKUB dan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya	Terciptanya kerukunan umat beragama yang harmonis	Persentase konflik keagamaan yang terdata dan terfasilitasi	79,84
			Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum	Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu Nasional dan Lokal	79,18
2.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan OPD	Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan OPD	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan OPD	Nilai Sakip	67

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan target sasaran renja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2022 melaksanakan program, kegiatan dan Sub Kegiatan antara lain :

- I. Sasaran : Terciptanya Kerukunan Umat Beragama yang Harmonis
1. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA & KARAKTER KEBANGSAAN
 - a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
 2. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
 3. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

II. Sasaran : Meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum

1. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

- Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika, Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan & Parpol, Pemilihan Umum/PILKADA, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.
- Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan & Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
- Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/PILKADA, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah.
- Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

2. PROGRAM PEMBERDAYAAN & PENGAWASAN ORMAS

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
 - Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

III. Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan OPD

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi & Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi & Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan Gedung kantor atau bangunan lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada renja perubahan tahun 2022, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merencanakan melaksanakan 6 Program, 13 Kegiatan dan 33 Sub Kegiatan. dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4,120,208,950,-. Alokasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta indikasi pendanaan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1
Perubahan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun 2022

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU		CATATN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5			6	7	9	10
	Belanja Operasi					4.120.208.837	4.120.208.839			5.549.112.457
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota		Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi	100%	100%	2.560.903.467	2.436.448.914		95%	3.549.538.822
	Keg : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	100%	100%	24.380.675	30.542.125		100%	30.500.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	2 Dok	2 Dok	17.493.200	19.666.600		2 Dok	4.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dok	2 Dok	3.443.725	4.873.650		2 Dok	18.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan – SKPDPA		Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	-	-	-	-		2 Dok	4.000.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun	10 Dok	10 Dok	3.443.750	6.001.875		10 Dok	4.500.000

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU		CATATN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5			6	7	9	10
	Keg : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	100%	100%	2.034.107.291	1.565.492.467		100%	2.193.868.822
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan nya terbayarkan	19 Orang	12 Orang	1.975.714.796	1.505.599.972		19 Orang	2.133.868.822
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semes- teran SKPD yang disusun tepat waktu	18 Dok	18 Dok	58.392.495	59.892.495		18 Dok	60.000.000
	Keg. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar	100%	100%	1.804.425	1.804.425		100%	2.000.000
	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD		Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun	4 Dok	4 Dok	1.804.425	1.804.425		4 Dok	2.000.000
	Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase data dan informasi pegawai perangkat daerah yang diadministrasikan	100%	100%	47.648.376	62.149.953		100%	115.200.000
	Pengadaan pakaian dinas beserta atributnya		Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya yang disediakan	-	-	-	-		32 Pasang	21.200.000

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU		CATATN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5			6	7	9	10
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan	12 Dok	12 Dok	31.848.376	28.509.953		12 Dok	34.000.000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah ASN dan Upah Jasa yang mengikuti bimtek dan implementasi peraturan perundang-undangan	2 Orang	4 Orang	15.800.000	33.640.000		19 Orang	60.000.000
	Keg : Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase kebutuhan umum perangkat daerah yang terpenuhi	100%	100%	299.582.700	401.612.575		100%	266.820.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor		Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	8 Jenis	10 Jenis	2.194.150	8.905.925		8 Jenis	2.700.000
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	0	6 Buah	-	2.940.000		5 Unit	1.600.000
	Penyediaan bahan logistik kantor		Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	19 Jenis	20 Jenis	3.975.350	8.181.150		24 Jenis	6.000.000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Jumlah barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan	3 Jenis	3 Jenis	10.725.000	14.840.000		3 Jenis	12.000.000
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60 Exemplar	60 Exemplar	6.120.000	6.720.000		72 Exemplar	7.320.000
	Fasilitasi kunjungan tamu		Jumlah tamu yang difasilitasi	150 Orang	200 Orang	6.750.000	9.000.000		160 Orang	7.200.000

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU		CATATN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5			6	7	9	10
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti	304 Kali	470 Kali	269.818.200	351.025.500		280 Kali	230.000.000
	Keg : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang diadakan	100%	100%	15.000.000	201.527.369		100%	770.800.000
	Pengadaan mebel		Jumlah mebel yang diadakan	-	23 Jenis	-	38.471.369		7 Unit	70.000.000
	Pengadaan Kendaraan dinas operasional atau lapangan		Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	-	-	-	-		1 Unit	500.000.000
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya		Jumlah peralatan/mesin lainnya yang diadakan	1 Unit	14 Unit	15.000.000	138.336.000		4 Unit	50.800.000
	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	-	2 Unit	-	24.720.000		1 Unit	150.000.000
	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	-	-	-	-		-	-
	Keg : Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	100%	96.900.000	93.700.000		100%	102.500.000
	Penyediaan jasa surat menyurat		Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	350 Surat	350 Surat	2.400.000	1.000.000		350 Surat	2.700.000

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU		CATATN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5			6	7	9	10
	Penyediaan jasa komunikasi Sumber daya air dan listrik		Jumlah rekening telepon, air dan listrik yang terbayarkan	24 Rekening	24 Rekening	37.500.000	34.500.000		24 Rekening	38.000.000
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan	3 Orang	4 Orang	57.000.000	58.200.000		4 Orang	61.800.000
	Keg : Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100%	100%	41.480.000	79.620.000		100%	67.850.000
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	4 Unit	4 Unit	21.000.000	32.000.000		4 Unit	21.000.000
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	29 Unit	30 Unit	13.480.000	16.980.000		36 Unit	16.850.000
	Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	-	1 Unit	-	18.640.000		1 Unit	15.000.000
	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	7.000.000	12.000.000		1 Unit	15.000.000
	Program : Penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Persentase pelaksanaan kebijakan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan yang dilaksanakan	95%	95%	84.835.590	151.804.590		95%	239.573.635

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU		CATATN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5			6	7	9	10
	Keg : Perumusan Kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa		Persentase capaian pelaksanaan koordinasi dibidang ideologi Pancasila, Wawasan Bangsa, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Bangsa, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Bangsa	95%	95%	84.835.590	151.804.590		95%	239.573.635
	Pelaksanaan koordinasi dibidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan		Jumlah Laporan pelaksanaan koordinasi dibidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, yang disusun	3 Laporan	3 Laporan	84.835.590	151.804.590		4 Laporan	239.573.635
	Program : Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik		Persentase capaian Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	95%	95%	724.517.315	752.192.315		95%	1.075.000.000

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU		CATATN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5			6	7	9	10
	Keg :Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika, budaya politik, peningkatan demokrasi. Fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik		Persentase capaian pendidikan politik, etika budaya politik dan peningkatan demokrasi dan fasilitasi kelembagaan pemerintahan serta pemantauan politik	95%	95%	724.517.315	752.192.315		95%	1.075.000.000
	Penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah		Jumlah pengurus parpol dan masyarakat yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM	20 Orang	20 Orang	30.966.350	27.236.350		110 Orang	140.000.000
	Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah		Persentase partisipasi pilih	-	-	-	-		95%	200.000.000

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU		CATATN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5			6	7	9	10
	Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah		Jumlah laporan partai politik yang diverifikasi	10 Laporan	10 Laporan	684.198.925	698.883.925		10 Laporan	700.000.000
	Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah		Jumlah laporan pemantauan situasi politik daerah	4 Laporan	4 Laporan	9.352.040	26.072.040		4 Laporan	35.000.000
	Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Persentase jumlah ormas yang diberdayakan dan diawasi	100%	100%	24.351.370	40.761.370		95%	60.000.000
	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan		Jumlah Ormas yang diberdayakan dan diawasi	102 Unit	110 Unit	24.351.370	40.761.370		95%	60.000.000

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU		CATATN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5			6	7	9	10
	Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah		Jumlah SKT yang terbit	102 SKT	110 Unit	24.351.370	40.761.370		104 Unit	60.000.000
	Program : Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Persentase jumlah pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	95%	95%	360.501.865	308.608.365		95%	160.000.000
	Keg : Perumusan Kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan, ekonomi, sosial dan budaya		Persentase capaian pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, budaya serta kerukunan umat beragama	95%	95%	360.501.865	308.608.365		95%	160.000.000
	Pelaksanaan koordinasi dibidang ketahanan ekonomi, sosial. Budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan		Jumlah Laporan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, budaya serta kerukunan umat beragama	4 Laporan	4 Laporan	360.501.865	308.608.365		4 Laporan	160.000.000
	Program :Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial		Persentase capaian peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial	95%	95%	365.099.230	430.393.285		95%	465.000.000

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU		CATATN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5			6	7	9	10
	Keg : Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial		Persentase capaian pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial dan pemantauan orang asing	95%	95%	365.099.230	430.393.285		95%	465.000.000
	Pelaksanaan koordinasi dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik daerah		Jumlah laporan konflik sosial dan kewaspadaan dini di daerah	4 Laporan	4 Laporan	351.202.925	404.236.980		4 Laporan	430.000.000
	Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah		Jumlah laporan pengawasan dan pemantauan orang asing	4 Laporan	4 Laporan	13.896.305	26.156.305		4 Laporan	35.000.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai rujukan dalam pelaksanaan perubahan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022.

Keberhasilan pelaksanaan perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini sangat tergantung kepada peran aktif seluruh jajaran pimpinan dan staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Untuk itu diperlukan sikap mental, tekad, semangat, dan kekuatan serta disiplin semua unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan cara memberi dukungan penuh terhadap pelaksanaan program serta kegiatan sesuai dengan fungsi dan kemampuan masing-masing.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Kesbang Pol Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 disusun, semoga mampu meningkatkan kinerja Badan Kesbang Pol dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

Malili, September 2022

Kepala Badan Kesbangpol,



GUNTUR HAFID, S.Pd, M.Si
Pangkat : Pembina Tk. I
Nip : 19710502 199208 1 001